



MENGENDALIKAN KETIMPANGAN DI PERDESAAN MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN PEREKONOMIAN DESA



Veto Tyas Indriro/SMERU

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Dengan 60% penduduk miskin berada di perdesaan, upaya penanggulangan ketimpangan di wilayah ini penting untuk segera dilakukan agar pertumbuhan ekonomi dapat secara efektif menurunkan kemiskinan di tingkat nasional. Upaya ini harus dimulai dengan pemahaman tepat mengenai sumber peningkatan ketimpangan di perdesaan.

Hasil analisis dekomposisi peningkatan ketimpangan di perdesaan dalam periode 2004–2014 menunjukkan pentingnya pemerataan distribusi capaian pendidikan dalam mengendalikan ketimpangan. Perbedaan upah antara pekerja berpendidikan tinggi¹ dan pekerja berpendidikan rendah² di perdesaan lebih kecil daripada di perkotaan. Hal ini diduga telah mendorong pekerja berpendidikan tinggi untuk bermigrasi ke perkotaan. Akibatnya, perdesaan terus didominasi pekerja berpendidikan rendah. Ketimpangan pun tak terelakkan karena sektor ekonomi yang menawarkan penghasilan tinggi hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang berpendidikan tinggi.

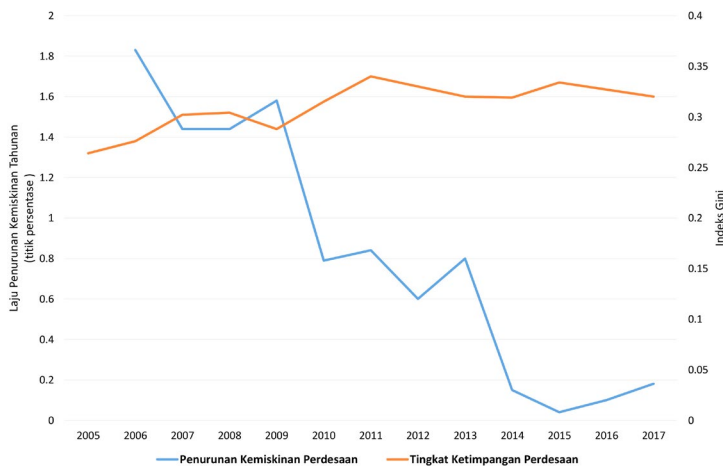
Untuk mengendalikan ketimpangan di perdesaan, diperlukan peningkatan pendidikan calon angkatan kerja melalui kebijakan 'satu desa-satu SMA' serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pekerja berpendidikan rendah melalui kerja sama dengan pihak swasta. Kerja sama ini dapat mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional sehingga terjadi peningkatan upah. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi pekerja berpendidikan tinggi untuk bertahan di perdesaan.

¹ Pendidikan tinggi dalam catatan kebijakan ini mencakup sekolah menengah atas (SMA), diploma, dan perguruan tinggi.

² Pendidikan rendah dalam catatan kebijakan ini mencakup sekolah menengah pertama (SMP), sekolah dasar (SD), dan tak berpendidikan sama sekali.

Memahami Sumber Peningkatan Ketimpangan di Perdesaan: Keterkaitan antara Struktur Ekonomi dan Capaian Pendidikan

Pengendalian ketimpangan di perdesaan penting bagi penurunan kemiskinan di tingkat nasional karena sekitar 60% penduduk miskin tinggal di perdesaan. Dalam periode 2005–2017, laju penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan menjadi lebih cepat saat terjadi penurunan ketimpangan, sebagaimana terjadi pada 2009 dan 2013 serta dalam periode 2015–2017. Sebaliknya, laju penurunan kemiskinan melambat ketika terjadi peningkatan ketimpangan, sebagaimana terjadi dalam periode 2005–2007 dan 2009–2010 (Gambar 1). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan upaya pengendalian ketimpangan.



Gambar 1. Penurunan kemiskinan dan tingkat ketimpangan di perdesaan Indonesia

Sumber: - Data penurunan kemiskinan di perdesaan diperoleh dari Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2005–2017.

- Data tingkat ketimpangan di perdesaan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2018.

Analisis dekomposisi peningkatan ketimpangan dalam periode 2004–2014 menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan di perdesaan lebih disebabkan oleh ketimpangan capaian pendidikan daripada ketimpangan imbal hasil³ (upah) antarjenjang pendidikan. Sebesar 30% dari peningkatan ketimpangan ekonomi dalam periode 2004–2014 dijelaskan oleh perubahan komposisi capaian pendidikan

³ Istilah imbal hasil pendidikan (*return on education*) sering kali dipahami sebagai tingkat upah/keuntungan usaha yang diperoleh setelah seseorang memasuki pasar kerja. Namun, dalam studi ini imbal hasil pendidikan merujuk pada perbedaan relatif konsumsi per kapita antarorang dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tingkat konsumsi atau tingkat upah/keuntungan ini dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan. Untuk memudahkan pembaca memahami konteks catatan kebijakan ini, istilah imbal hasil selanjutnya akan diwakili oleh istilah upah.

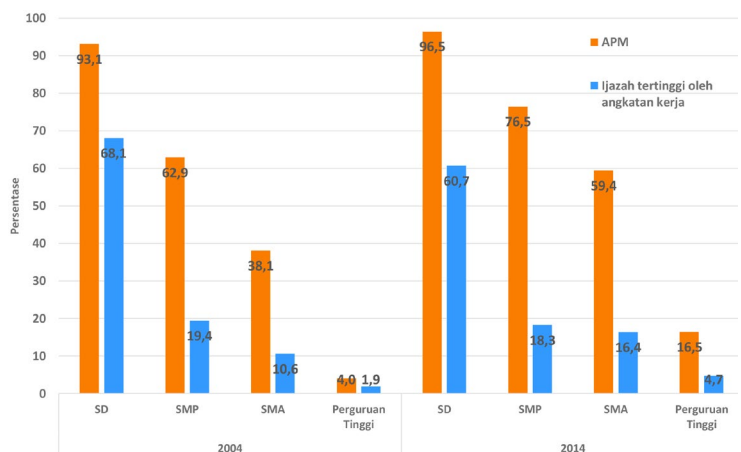
Tabel 1. Kontribusi Pendidikan terhadap Perubahan Ketimpangan (%)

Variabel	Efek Perubahan Harga	Efek Perubahan Distribusi	Total
Pendidikan kepala rumah tangga	4,8	11,5	16,2
Pendidikan pasangan kepala rumah tangga	-0,2	9,4	9,1
Pendidikan rata-rata anggota rumah tangga lainnya	-1,3	9,5	8,2
Jumlah kontribusi pendidikan	3,3	30,4	33,5

Sumber: Warda, Nila, Ridho Izzati, Elza Elmira, dan Mayang Rizky (akan dipublikasikan).

penduduk perdesaan yang didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan rendah. Angka ini jauh lebih besar daripada kontribusi perbedaan upah antarjenjang pendidikan yang tidak mencapai 5% (Tabel 1). Artinya, pemerataan distribusi capaian pendidikan antarkelompok masyarakat dalam desa merupakan kunci bagi pengendalian ketimpangan.

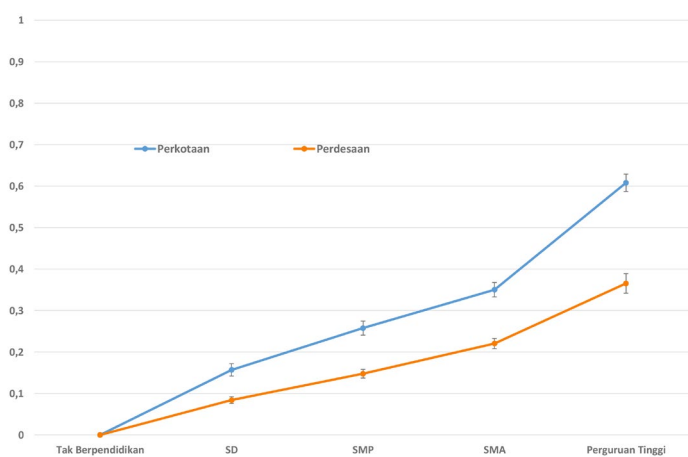
Dalam satu dekade terakhir, meskipun terjadi peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi, angkatan kerja di wilayah perdesaan tetap didominasi oleh kelompok berpendidikan rendah yang sulit menjangkau sektor ekonomi dengan upah tinggi. Angka partisipasi murni (APM) untuk jenjang SMA meningkat dari 38,12% pada 2004 menjadi 59,45% pada 2014. APM perguruan tinggi juga meningkat hingga empat kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun. Meskipun terjadi peningkatan proporsi angkatan kerja lulusan SMA dan perguruan tinggi, angkatan kerja di perdesaan tetap didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah (Gambar 2). Dengan dominasi angkatan kerja berpendidikan rendah, lapangan kerja yang menawarkan upah tinggi, seperti di sektor listrik dan gas serta sektor perdagangan, hotel, dan rumah makan, hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang berpendidikan tinggi. Kondisi inilah yang menciptakan ketimpangan ekonomi di perdesaan.



Gambar 2. Perbandingan APM penduduk dan kepemilikan ijazah tertinggi antarangkatan kerja di perdesaan pada 2004 dan 2014

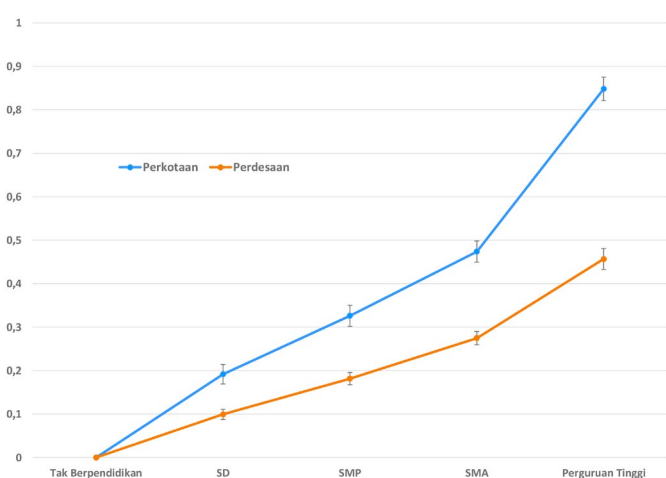
Sumber: Diolah dari Susenas dan Sakernas, 2004 dan 2014.

Jika dibandingkan dengan di perdesaan, perbedaan upah relatif antara pekerja berpendidikan tinggi dan pekerja berpendidikan rendah di perkotaan jauh lebih besar dan meningkat selama satu dekade (2004–2014) (Gambar 3 dan 4). Sebagai ilustrasi, pada 2014 seorang pekerja lulusan SMA di perdesaan akan memperoleh upah 27,7% lebih besar daripada pekerja tak berpendidikan. Akan tetapi, ia akan memperoleh upah 47,4% lebih tinggi daripada pekerja tak berpendidikan ketika ia bekerja di perkotaan (Gambar 4). Hal ini tentu saja menjadi disinsentif bagi masyarakat berpendidikan tinggi untuk bekerja di perdesaan. Oleh karena itu, tanpa kenaikan upah bagi pekerja berpendidikan tinggi di perdesaan, arus migrasi ke perkotaan akan sulit dikendalikan. Akibatnya, angkatan kerja di wilayah perdesaan akan terus didominasi oleh kelompok berpendidikan rendah dan ketimpangan pun akan makin sulit dikendalikan.



Gambar 3. Perbedaan upah relatif antara individu di tiap jenjang pendidikan dan individu tak berpendidikan di perkotaan dan perdesaan pada 2004

Sumber: Warda, Nila, Ridho Izzati, Elza Elmira, dan Mayang Rizky (akan dipublikasikan).



Gambar 4. Perbedaan upah relatif antara individu di tiap jenjang pendidikan dan individu tak berpendidikan di perkotaan dan perdesaan pada 2014

Sumber: Warda, Nila, Ridho Izzati, Elza Elmira, dan Mayang Rizky (akan dipublikasikan).

Rekomendasi

Berangkat dari permasalahan timpangnya capaian pendidikan, catatan kebijakan ini menitikberatkan pada strategi untuk mewujudkan pemerataan capaian pendidikan dan peningkatan SDM dengan mendorong investasi di perdesaan. Dengan menggandeng pihak swasta, peningkatan produktivitas angkatan kerja berpendidikan rendah dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

1. Kebijakan 'satu desa-satu SMA' untuk mempersiapkan calon angkatan kerja yang dapat mengakses pekerjaan di sektor formal di perdesaan

Salah satu penyebab ketimpangan di perdesaan adalah rendahnya capaian pendidikan sebagian besar angkatan kerja di wilayah ini. Untuk menekan pertumbuhan angkatan kerja berpendidikan rendah di perdesaan, diperlukan kebijakan satu desa-satu SMA. Dengan adanya satu SMA di setiap desa, APM SMA akan meningkat karena masyarakat makin mudah dalam mengakses pendidikan tinggi. Peningkatan APM SMA juga dapat menjadi pendorong bagi meningkatnya APM perguruan tinggi. Dengan demikian, pada masa depan diharapkan makin banyak angkatan kerja yang dapat mengakses pekerjaan di sektor formal dengan upah yang relatif lebih tinggi.

Namun, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menciptakan pekerjaan-pekerjaan di sektor formal dan nonformal di perdesaan yang menawarkan upah tinggi sehingga dapat menampung angkatan kerja dengan capaian pendidikan yang lebih tinggi. Jika jenis dan jumlah pekerjaan yang menawarkan upah tinggi terbatas, penduduk dengan capaian pendidikan tinggi akan meninggalkan desa dan siklus migrasi desa-kota akan terus berlanjut. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan investasi di perdesaan dalam rangka merangsang pertumbuhan sektor-sektor pekerjaan dengan upah tinggi.

2. Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui kerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas angkatan kerja berpendidikan rendah di perdesaan

Selama ini, upaya merangsang pertumbuhan ekonomi melalui investasi di perdesaan terkendala oleh masalah angkatan kerja yang didominasi pekerja berpendidikan rendah yang pada umumnya memiliki keahlian dan produktivitas yang rendah. Oleh karena itu, langkah awal yang diperlukan adalah penyediaan pendidikan nonformal dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi angkatan kerja berpendidikan rendah di perdesaan agar keahlian dan produktivitas mereka dapat meningkat.



The SMERU Research Institute

Penulis:
Nila Warda
Wiwin Purbaningrum
Elza Elmira

Editor:
Liza Hadiz

Desain dan Tata Letak:
Novita Maizir

©2019 SMERU
Untuk catatan kebijakan lainnya, silakan kunjungi www.smeru.or.id.

SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

📍 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330, Indonesia
☎ +6221 3193 6336
+6221 3193 0850 (faks)
✉ smeru@smeru.or.id
🌐 www.smeru.or.id

📱 @SMERUInstitute
📺 @SMERUInstitute
📺 The SMERU Research Institute
📺 The SMERU Research Institute

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan kebijakan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Jenis pelatihan dan pendampingan perlu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang ditekuni, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian dan baik sebagai wiraswasta maupun pekerja penerima upah. Agar berkelanjutan, pemerintah daerah perlu berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara pihak swasta yang terkait dan angkatan kerja dalam bentuk penyediaan pelatihan dan pendampingan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa kerja sama tersebut terjalin berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan bukan bersifat bantuan. Artinya, setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut memberikan kontribusi keuangan dan memperoleh keuntungan secara proporsional. Hal ini akan menjadi insentif bagi setiap pihak untuk memainkan perannya seoptimal mungkin. Pengelolaan usaha secara lebih profesional ini diharapkan dapat mendorong peningkatan upah yang pada akhirnya akan menjadi daya tarik bagi pekerja berpendidikan tinggi untuk bertahan di perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat mengadaptasi beberapa program pemberdayaan berbasis keberantaraan antara masyarakat dan pihak swasta yang sudah berhasil seperti berikut.

- Dalam pengelolaan usaha di sektor pertanian, Australia-Indonesia Partnership for Rural Economic Development (AIP Rural) melakukan program pendampingan bagi petani rumput laut di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Dengan program ini, petani mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi rumput laut. AIP Rural juga menjadi perantara pemasaran yang menghubungkan petani dengan perusahaan pembeli rumput laut.
- Masih di sektor pertanian, Mercy-Corps menerapkan model bisnis keuangan pertanian (*agriculture financing business model*) dengan memberikan pendampingan teknis pengelolaan pertanian dan menjembatani petani dengan lembaga keuangan, seperti Syngenta Indonesia, Bank Andara, BPR Pesisir Akbar, dan ACA Insurance, yang memberikan akses permodalan dan sekaligus asuransi pertanian melalui sistem AgriFin Mobile.
- Dalam pengelolaan usaha nonpertanian, Pemerintah Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Komunitas Bukalapak meresmikan Kampung Wirausaha Online yang menjadi wadah bagi usaha kecil dan warga untuk mendapatkan pendampingan usaha yang memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk. Dengan kerja sama ini, usaha kecil dan warga secara umum menjadi lebih produktif, sementara perusahaan rintisan Bukalapak dapat menjaring calon penjual yang akan memanfaatkan platform digital ini.

Dengan melihat potensi tersebut, pemerintah daerah perlu memanfaatkan pemberdayaan berbasis keberantaraan antara masyarakat dan pihak swasta untuk menghidupkan dan menggairahkan perekonomian di perdesaan. ■

Daftar Acuan

Warda, Nila, Ridho Izzati, Elza Elmira, dan Mayang Rizky (akan dipublikasikan) 'Mengapa Pendidikan Tidak Mampu Menurunkan Ketimpangan?' Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.